



Pemandangan Umum Fraksi terhadap APBD 2022 dan RPJMD 2026

SAMBAS, SP - Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 memasuki tahapan Pemandangan Umum dari DPRD Kabupaten Sambas.

Delapan fraksi di DPRD menyatakan Pemandangan Umumnya atas dua Raperda yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Sambas kepada DPRD Kabupaten Sambas.

Delapan Fraksi di an-

taranya Fraksi Gerindra, Asmuli, Fraksi PDI Perjuangan, Melani Astuti, Fraksi Nasional Demokrat, Sumardi, Fraksi PKS, Winardi, Fraksi PAN, Badri Kodri, Fraksi PKB, Yudha Alwin S Ked, Fraksi Peratuan Demokrat, Muzahar dan Fraksi Golkar, Supni Alatas.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sambas, Abu Bakar didampingi Wakil Ketua I, Ferdinan Syolihin dan Wakil Ketua III, Suriadi. Dari eksekutif,

hadir Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi, Sekda Kabupaten Sambas, Ferry Madagaskar dan para asisten, Staf Ahli Bupati Sambas dan Pejabat Eselon II dan III Pemda Kabupaten Sambas.

Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi, masing-masing juru bicara menegaskan masukan, kritik hingga saran terkait APBD Tahun Anggaran 2022 dan RPJMD Sambas 2021-2026. Dikatakan Ketua DPRD Sambas hal tersebut merupakan hal yang lumrah.

“Momentum Pemandangan Umum dimanfaatkan setiap fraksi

menyampaikan kritikan, masukan maupun saran mengenai materi yang dibahas. Hal ini penting, dalam penyempurnaan produk hukum yang akan diterbitkan nantinya,” terang Abu Bakar, kemarin.

Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi mengajak semua komponen mendukung Pemerintah Daerah dan DPRD Sambas melakukan pembahasan APBD 2022 dan RPJMD 2026 tersebut. Menurut dia, dukungan semua pihak sangat diperlukan.

“Dukung dan doakan kami agar APBD 2022 maupun RPJMD 2021-2026 segera bisa tersusun dengan baik, yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi semua, daerah dan masyarakat, untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama,” tutur Wabup.

Supni Alatas, mewakili Fraksi Partai Golkar menegaskan beberapa hal penting dalam Pemandangan Umum Fraksinya. Supni mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam penyajian data.

“Terjadi perbedaan yang signifikan antara data yang dimiliki daerah dengan BPS, karena data yang valid sangat penting untuk kita menyusun perencanaan termasuk dalam APBD maupun RPJMD,” tutur Supni

Selain itu, Supni Alatas minta tidak terjadi ego sektoral dalam pengelolaan pembangunan. Dia mengkhawatirkan jika program dan kegiatan yang disusun dalam perencanaan pembangunan tidak menyentuh langsung rakyat atau masyarakat.

“Kita berharap, stakeholder terutama OPD-OPD



Supni Alatas

Perwakilan Fraksi Partai Golkar

Kita berharap, stakeholder terutama OPD-OPD yang ada tidak ego sektoral dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Harusnya saling sinergi.

yang ada tidak ego sektoral dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Harusnya saling sinergi. Kita contohkan misalnya, ketika direncanakan pembangunan Rumah Sakit Pratama, harusnya dinas terkait juga segera melakukan perencanaan pembangunan jalan hingga PJU-nya,” papar Supni Alatas.

Hal lain yang ditegaskan Legislator Partai Golkar

ini terkait masih minimnya sarana prasarana yang mendukung sekolah di pinggiran daerah, baik akses jalan maupun fasilitas pendidikan. Supni juga berharap, kedepannya, Pemkab sudah melakukan manajemen data berbasis IT.

“Ada pepatah mengatakan, jika salah dalam penyajian data, sama saja kita merencanakan kegagalan,” ucap Supni. **(noi)**